

# **ANALISA TENTANG PERPECAHAN PASANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PERIODE 2003 – 2008 DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

**Oleh :**

**Sri Wahyuni Wildah, Drs. H. Muhammad Ridwan  
Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Riau : [Sriwahyuniwildah@yahoo.com](mailto:Sriwahyuniwildah@yahoo.com), 085356269773**

## ***Abstract***

Analysis titled Couple split on Regent and Vice Regent Period 2003 - 2008 in the District of Indragiri Hilir was written to determine the cause of the separation of couples local leaders in the district. Inhil in Election 2008 with the research took place in the district Inhil. In the era of regional autonomy, Regional Head elections (Pilkada) have been conducted directly. And government leaders often encountered couples split even compete at the end of the period of his leadership.

This is a problem in this study. This research used theory and rule on conflicts hadari nawawi. Conflicts occur due to personal incompatibility, differences in value systems, unclear boundaries - boundaries of authority and responsibility, and so forth. Making the elite in government involved in a conflict which will only weaken the position of the government.

In this study authors used qualitative research methods who intend to seek the facts much - much to then be concluded. The type of data used in this study primary data obtained from interviews with informants who are considered to know a lot about the problems in care. There are also secondary data obtained from agencies involved in the research.

Based on the findings in the district. Inhil, partner government leaders split up due to personal incompatibility, differences in value systems, differences in leadership style, and triggering political marketing competition evident in the 2008 elections. It can be seen that on Based Direct Election, General, Free, Confidential, Honest and Fair (LUBER) according to article 56 paragraph 1 of Law no. 32 of 2004, which involves the entire community, between the two heads of government (Regional Head and Deputy Head) Compete for the position of the previous period the Regional Head. so family unity government leaders can create an individual - each party can unite a mismatch between them.

The competition between the incumbent partner often occur at this time. By using the theory of power (Deliar Noer) and conflict (Hadari Nawawi), This study is expected to be a suggestion or paradigm in choosing a partner government leaders that implementation of the administration to run as expected and integrity of the partner government leaders can stay awake.

***Kata Kunci : Perpecahan, Pasangan Pemimpin Pemerintahan, Indragiri Hilir***

## ***Pendahuluan***

Demokrasi telah memberikan kesempatan yang sangat luas pada setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam menjalankan pemerintahan. karena pada dasarnya demokrasi merupakan pemerintahan dimana kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat ( Miriam Budiardjo. Prinsip – prinsip dasar politik, hal: 105. kesadaran inilah yang akhirnya melahirkan Undang – Undang Otonomi Daerah yaitu UU Nomor 22 dan 25 Tahun 1999 yang mulai dilaksanakan 2001 dan kemudian diubah menjadi UU Nomor 32 dan 33 Tahun 2004.

Langkah terobosan yang dilakukan dalam hal pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah ( Pilkada ) adalah mengharuskan semua kepala daerah di Indonesia dipilih melalui Pilkada mulai pertengahan 2005. sejak saat itu, semua kepala daerah yang telah habis masa jabatannya harus dipilih melalui Pilkada.

Pilkada bertujuan untuk menjadikan pemerintahan daerah yang demokratis dengan memberi hak pada rakyat untuk menentukan kepala daerah. Dan dalam pencalonan setiap kepala daerah memiliki pasangan masing - masing, sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 pasal 24. bagi kepala. namun, dalam perjalanan kepemimpinan tersebut, seringkali ditemui pecahnya hubungan antara kepala daerah dan wakil kepala daerah yang akhirnya penyelenggaraan kepemimpinan cenderung tidak berlanjut. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan yang akhirnya menjurus pada konflik dan

Meski tugas dan wewenang kepala daerah dan wakilnya telah diatur dengan jelas dalam Undang-undang, namun tetap saja masih ditemui perpecahan pasangan pemimpin pemerintahan. Hal serupa juga terjadi pada pasangan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir ( Inhil ) pada periode 2003 – 2008, H. Indra Muchlis Adnan yang akhirnya berpisah dengan wakilnya H. M .Yusuf pada Pemilu Kepala Daerah Inhil untuk periode 2008 – 2013. Pasangan pemerintah ini awalnya dipasangkan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati pada tahun 2003 melalui pemilihan langsung oleh DPRD Inhil, dan akhirnya pasangan ini memenangkan perolehan suara telak menggantikan bupati inhil lama yaitu Rusli Zainal yang kini menjabat sebagai gubernur Riau.

Hal yang menarik pada pasangan pemimpin daerah ini adalah, pada awalnya saat pemilu 2003 ketika Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah dipilih secara langsung oleh DPRD kabupaten, H. Indra Muchlis Adnan selaku calon Bupati dari Fraksi Golkar sebenarnya tidak menginginkan disandingkan berasama H.M.Yusuf melainkan ia menginginkan berpasangan dengan Rusman Malomo B,Sc namun karena saat itu Rusman Malomo menjabat sebagai ketua DPRD lalu ditambah tekanan dan dorongan dari berbagai pihak, maka mau tidak mau beliau menerima keputusan fraksi untuk menyandingkannya dengan H.M.Yusuf. akhirnya, pasangan pemimpin pemerintahan ini memperoleh suara terbanyak dan memenangkan pemilihan kepala daerah ( Pilkada).

Namun, hanya berselang beberapa tahun dalam periode kekuasaan mereka mulai tampak kerenggangan hubungan antara kepala daerah dengan wakil kepala daerah. Meski awalnya pasangan pemerintahan ini berhasil memimpin dengan cukup baik namun karena adanya ketidakcocokan yang akhirnya menjurus pada perpecahan. Adanya pembagian tugas yang tidak sesuai, dimana Wakil Bupati hanya berfungsi sebagai administrator padahal dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2004 mengenai tugas Wakil Kepala Daerah jelas tertulis

pada pasal 25 ayat (1) yang menerangkan bahwa tugas Wakil Kepala Daerah tidak hanya membantu Kepala Daerah tetapi juga memiliki wewenang memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan kabupaten serta memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Daerah dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan daerah.

Bupati tidak memberikan akses pada wakil nya untuk melaksanakan tugas seperti yang tertuang dalam Undang-undang. Tugas yang seharusnya dilakukan oleh wakil bupati dilakukan oleh pihak bupati itu sendiri. Akibatnya, terjadi banyak penyelewengan penyelenggaraan pemerintahan oleh bupati karena pemerintahan dipenuhi oleh pihak-pihak yang "dimiliki" oleh bupati akibatnya Wakil bupati merasa hanya menjadi boneka pelengkap dalam kegiatan pemerintahan.

Perbedaan prinsip dalam menjalankan pemerintahan menjadi alasan mengapa pasangan pemerintahan ini menjalankan fungsinya sesuai keinginan masing-masing. Dimana bupati dalam menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan komando nya, ia memberi posisi-posisi strategis kepada orang-orang nya yang yang belakangan diketahui bertujuan sebagai *marketing politik* sang bupati. Tentu saja hal ini bertentangan dengan wakil sebagai seorang profesional yang menginginkan pemerintahan di jalankan sesuai dengan prosedur dan keahlian. Hal inilah menjadi penyebab pasangan pemimpin pemerintahan ini tidak melanjutkan duet pemerintahan mereka pada periode selanjutnya.

Kerenggangan antara bupati dan wakil bupati sangat ketara pada tahun-tahun akhir periode pemerintahan mereka, dimana saat itu H. Indra Muchlis Adnan selaku bupati yang ingin mencalonkan diri kembali pada periode berikutnya namun mengalami perpecahan pendapat dengan wakilnya, H.M. Yusuf. Belum lagi maraknya desas desus yang mengenai niat wakil bupati untuk mencalonkan diri sebagai bupati inhil periode 2008 – 2013.hal ini mengakibatkan krisis wewenang dari bupati terhadap wakil bupati yang mengakibatkan pelaksanaan pemerintahan yang tidak kompak karena pembagian kerja yang memburuk.

Pasangan pemimpin ini pun akhirnya memutuskan untuk berpisah jalan dan bersaing memperebutkan posisi sebagai kepala daerah ( bupati inhil ). H. Indra Muchlis Adnan akhirnya berpasangan dengan Rosman Malomo yang notabene merupakan mantan ketua DPRD sewaktu H.Indra Muchlis Adnan menjadi bupati pada periode sebelumnya. Tidak jauh berbeda, H. Yusuf memilih Fauzan Hamid sebagai pasangannya untuk maju sebagai bupati dan wakil bupati inhil periode 2008 – 2013 mereka menjadi pasangan pemimpin dari pihak independen. Penelitian ini memiliki urgensi bahwa pelaksanaan pemerintahan yang baik tidak akan tercipta apabila dalam pelaksanaannya dipenuhi oleh kepentingan pribadi.maka dalam memilih pemimpin kita harus mengenal karakter orang tersebut.apabila ia tidak mampu menjalankan pemerintahan dengan baik pada skala sedang seperti kabupaten/kota, lalu bagaimana mungkin kita bisa mengharapkan orang tersebut memimpin daerah dalam skala besar seperti provinsi.

Berdasarkan fenomena yang telah dikemukakan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu : Mengapa pasangan pemimpin pemerintahan cenderung berpisah menjelang akhir masa jabatan (study kasus kabupaten indragiri hilir 2003-2008 ) ?

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan :

“ Untuk mengetahui penyebab perpecahan pasangan pemimpin pemerintahan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah tahun 2008 di Indragiri Hilir”.

Di dalam penelitian ini penulis akan mengemukakan teori yang dianggap relevan dengan permasalahan yang dikaji.

### **Kekuasaan**

Dalam kajian perpecahan pasangan pemimpin pemerintahan di Kabupaten Indragiri Hilir, pasangan Bupati dan Wakil Bupati sama-sama ingin menempati posisi sebagai Kepala Daerah. Tentunya hal ini merupakan sebuah kepentingan didalam sebuah kehidupan politik. Menurut Deliar Noer (1983: 6), bahwa politik adalah segala aktifitas atau sikap yang berhubungan dengan kekuasaan dan yang bermaksud untuk mempengaruhi, dengan jalan mengubah atau mempertahankan suatu macam bentuk susunan masyarakat. Ini artinya bahwa kekuasaan itu tidak lepas dari kehidupan berpolitik masyarakat, apalagi dilingkungan organisasi politik.

### **Konflik**

Konflik adalah suatu fenomena yang akan selalu mewarnai interaksi sosial sehari – hari dan menyertai kehidupan organisasi. situasi dan kondisi tertentu dapat memicu konflik, mulai dari ketidakcocokan pribadi, perbedaan sistem nilai, persaingan, ketidakjelasan batas – batas wewenang dan tanggung jawab, perbedaan fungsi, komunikasi yang tidak “ nyambung “, pertentangan kepentingan dan lain – lain. semakin bertambah besar sebuah organisasi, semakin banyak dan kompleks konflik yang akan dihadapi ( hadari nawawi, 2007 : 1 ).

Ketidakcocokan pribadi, perbedaan sistem nilai, persaingan, ketidak jelasan batas – batas wewenang dan tanggung jawab, perbedaan fungsi dan lain – lain menjadikan elit dalam pemerintahan terlibat dalam suatu konflik yang hanya akan melemahkan posisi pemerintah dimata konstituen.

### ***Metode Penelitian***

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif yang bermaksud mencari fakta sebanyak-banyaknya untuk kemudian diambil suatu kesimpulan( Winarto Surakmad, 1989:143 ).Penulis menguraikan penulisan ini dengan cara deskriptif yang dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang dikelilingi dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan atau subjek atau objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

#### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yang dapat diartikan sebagai proses pemecahan masalah yang

diselidiki dengan melukiskan atau mendeskripsikan keadaan subjek dan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau bagaimana adanya. Pada umumnya penelitian deskriptif merupakan penelitian yang non hipotesis sehingga dalam rangka penelitiannya bahkan tidak perlu merumuskan hipotesisnya. Lokasi dan Ruang Lingkup Penelitian

#### a. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan penulis di kabupaten indragiri hilir tepatnya di tembilahan kota. alasan penulis mengambil lokasi penelitian ini dikarenakan merupakan tempat objek yang dituju berada, lokasi juga merupakan pusat pemerintahan daerah indragiri hilir dan berhubungan langsung dengan pemerintah kabupaten, sehingga merupakan daerah pertama yang akan merasakan dampak dari setiap kebijakan yang dibuat pemerintah.

#### b. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian dilakukan antara tahun 2003 sampai 2008.pada saat itu perjalanan pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati Inhil berlangsung, namun diakhir masa jabatan tepatnya 1 tahun sebelum pemilihan kepala daerah pasangan pemerintah ini menampakkan gelagat bahwa mereka sudah tidak sejalan lagi.maka perlu ditelusuri alasan dan penyebab terjadinya perceraian politik tersebut.

## 2. Jenis Data

Adapun jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

1. data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan yang dianggap mengerti dan mengetahui mengenai alasan berpisahanya pasangan Bupati dan Wakil Bupati di akhir periode kepemimpinannya.

2. data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui sumber kedua.Data sekunder merupakan data yang diperoleh untuk melengkapi data primer, yang didapat yang didapatkan seperti : laporan-laporan, literature-literatur, dan lampiran data-data lain yang dipublikasikan yang mana dapat mendukung dan menjelaskan masalah penelitian.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Cara atau teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan melalui teknik sebagai berikut :

a.Wawancara mendalam (Indepth Interview), yaitu melakukan wawancara secara langsung dengan berbagai pihak yang terlibat langsung dan berkompeten tentang permasalahan yang diangkat guna memperoleh informasi yang akurat sehubungan dengan penelitian ini.

b.Dokumentasi, yaitu pengumpulan data melaluii dokumen-dokumen terkait yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini.

## 5. Informan

Untuk mendapatkan data dan informasi dilakukan dengan wawancara mendalam kepada aktor-aktor yang terlibat dalam perpecahan pasangan pemimpin pemerintahan di kabupaten Indragiri Hilir pasca lahirnya Undang-undang Otonomi Daerah nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Informan dipilih berdasarkan penarikan sampel nonprobabiliti yaitu dengan cara *sampling purposive* berdasarkan atas pertimbangan pengumpulan data sesuai dengan maksud dan tujuan (Sukandarrumidi, 2004: 65).

## 6. Teknik Analisa Data

Analisa data menggunakan deskriptif analistis, yaitu : suatu analisa yang menggambarkan dan memaparkan data sesuai dengan kenyataan dilapangan antara kondisi pemerintahan yang diharapkan masyarakat dengan keadaan yang terjadi. Data yang terkumpul diolah dan dianalisa secara deskriptif analistis menurut sumbernya, pengambilan kesimpulan dilakukan dengan membandingkan hasil penelitian dari berbagai sumber tersebut.

### ***Hasil dan Pembahasan***

#### **a. Fase - Fase Kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Inhil Periode 2003 -2008**

Pada awalnya pasangan Bupati dan Wakil bupati Inhil yakni Indra Muchlis Adnan dan H.M.Yusuf di jodohkan secara politik oleh pendukung mereka. Saat itu Indra Muchlis menjabat sebagai anggota DPRD Inhil dari fraksi Golkar ingin mencalonkan diri sebagai Bupati untuk periode 2003 – 2008. Atas dukungan Rusli Zainal yang waktu itu menjabat sebagai Bupati Inhil yang akan demisioner, maka terpilihlah H.M.Yusuf sebagai pendamping Indra Muchlis maju dalam pemiliha Kepala Daerah di DPRD. Sebenarnya, pada saat itu H.M.Yusuf tidak berminat menjadi Wakil Bupati. Justru ia sangat ingin pindah tuga ke pemerintah provinsi. Namun, atas desakan Rusli Zainal, maka suka tidak suka ia bersedia menerima tanggung jawab tersebut.

Dengan dukungan yang ada dari berbagai fraksi dalam DPRD seperti fraksi Golkar, PPP, PKB, dan sebagainya pemilihan Kepala Daerah dimenangkan oleh pasangan ini. Pada tanggal 22 November 2008 pasangan pemimpin pemerintahan ini di lantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati yang baru menggantikan Rusli Zainal yang telah demisioner dan menjadi Gubernur Riau.

Dalam menjalankan pemerintahan dapat dikatakan Indra Muchlis dan H.M.Yusuf sukses menjalankan tugas-tugas mereka, namun antara pribadi mereka tidak terjalin keakraban. Hubungan Bupati dan Wakil Bupati hanya terjalin sebatas tugas di pemerintahan saja. Perbedaan latar belakang menjadi salah salah satu penyebab ketidak akrabannya tersebut. Indra Muchlis merupakan seorang politisi dan beliau juga seorang pengusaha sehingga memiliki sifat yang “agresif“, sedangkan H.M. Yusuf merupakan birokrat handal selama bertahun-tahun sehingga memiliki sikap yang kaku.

Perbedaan prinsip dalam menjalankan pemerintahan menjadi alasan mengapa pasangan pemerintahan ini menjalankan fungsinya sesuai keinginan masing-masing. Dimana bupati dalam menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan komando nya, ia memberi posisi-posisi strategis kepada orang-orang nya yang yang belakangan diketahui bertujuan sebagai *marketing politik* sang bupati.

Kerengangan antara bupati dan wakil bupati sangat ketara pada tahun-tahun akhir periode pemerintahan mereka, dimana saat itu H. Indra Muchlis Adnan selaku bupati yang ingin mencalonkan diri kembali pada periode berikutnya namun mengalami perpecahan pendapat dengan wakilnya, H.M. Yusuf. Belum lagi maraknya desas desus yang mengenai niat wakil bupati untuk mencalonkan diri sebagai bupati inhil periode 2008 – 2013.hal ini mengakibatkan krisis wewenang dari bupati terhadap wakil bupati yang mengakibatkan pelaksanaan pemerintahan yang tidak kompak karena pembagian kerja yang memburuk. Perebutan kekuasaan ini telah menjadi sumber konflik seperti pendapat Deliar Noer (1983 : 6) bahwa politik adalah segala aktifitas atau sikap yang berhubungan dengan kekuasaan dan bermaksud untuk mempengaruhi, dengan jalan mengubah dan mempertahankan suatu bentuk susunan masyarakat. Ini artinya bahwa kekuasaan ini tidak lepas dari kehidupan berpolitik masyarakat, apalagi dilingkungan organisasi politik.

Akhirnya, pada pemilu 2008 pasangan pemimpin ini memutuskan untuk tidak melanjutkan duet politik mereka. Indra Muchlis yang sedari awal merasa tidak memiliki kecocokan dengan wakilnya, memilih pasangan duet yang sudah akrab baginya dan juga membawa keuntungan secara politik dan terpilihlah Rosman Malomo sebagai pasangannya untuk maju dalam Pemilihan Kepala Daerah ( Pilkada) 2008. Rosman Malomo merupakan orang terdekat Indra Muchlis, bahkan ia merupakan tim sukses Indra Muchlis ketika maju sebagai Bupati Inhil pada periode pertama.

Sementara itu, H.M.Yusuf yang awalnya tidak memiliki ambisi politik apapun memperoleh banyak bisikan-bisikan dari berbagai pihak agar mencalonkan diri sebagai Bupati pada pemilu 2008. beliau ikut serta dalam Pilkada Inhil bersama Fauzan Hamid, pasangan ini menjadi satu-satunya Calon Kepala Daerah yang berasal dari kalangan independen.

Dalam Pilkada Kab. Inhil pada tahun 2008 diikuti oleh 4 pasang peserta Pemilu, yakni H.M.Yusuf dan Fauzan Hamid (Yusfa), Indra Muchlis Adnan dan Rosman Malomo (Idaman), Syamsuddin Utu dan H.Subroto (Jisyamsu), Said Syarifuddin dan H.A.Ismed A. Wahab (Saidina). namun hal itu tidak menyulutkan tekad pasangan Bupati dan Wakil Bupati ini mencapai kekuasaan. Pilkada Kab. Inhil akhirnya mengantarkan Indra Muchlis kembali sebagai Bupati Kab. Inhil untuk periode 2008-2013.

## **b. Sebab - Sebab yang Menjadi Latar Belakang Berpisahnya Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Inhil pada Pilkada 2008**

### **1. Ketidakcocokan Pribadi Antara Bupati dan Wakil Bupati**

Konflik tidak harus ditandai dengan terjadinya perkelahian, peperangan, atau hal-hal yang berupa konfrontasi fisik, namun dapat juga ditandai dengan adanya ketidaksepakatan yang tajam atau oposisi atas berbagai kepentingan ide, pandangan, dan sebagainya. ( Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Robin, 2004 : 9 )

Konflik antara Bupati dan Wakil Bupati Inhil lebih menjurus kepada ketidakcocokan antar pribadi, seperti yang di ungkapkan sendiri oleh H.M.Yusuf selaku Wakil Bupati periode 2003 – 2008 ( wawancara dilakukan dirumah kediaman beliau, Jl. Sepakat pekanbaru. Tgl 30 November 2012 pukul 16:00 )

“ Secara pribadi saya tidak berteman dengan pak indra, kami berpasangan sebagai Bupati dan Wakil Bupati karna dijodohkan oleh pak Rusli Zainal. Pada saat itu, saya tidak berambisi apapun. Bagi saya segalanya biarlah mengalir apa adanya. Sebagai bawahan pak Rusli Zainal saya hanya patuh pada apa perintah atasan. Karna atasan meminta saya mendampingi pak Indra sebagai wakil beliau maka saya nurut saja. Hubungan saya dan pak indra hanya sebatas dikantor saja, diluar kantor kami biasa-biasa saja. “

Pernyataan tersebut merupakan bukti awal yang memperjelas adanya ketidakcocokan Bupati dan Wakilnya. Hubungan mereka hanya sebatas pekerjaan, sehingga komunikasi antara kedua belah pihak berjalan kaku. Padahal selayaknya pasangan pemimpin pemerintahan membentuk hubungan emosional sehingga dalam menjalankan tugas, mereka dapat sejalan. Namun kenyataan yang ada tidak demikian. Adanya ketidakcocokan pribadi tersebut juga disampaikan oleh H.Yunus Hasby selaku pengamat politik di Kab. Inhil ( wawancara dilakukan dipelabuaahn pulau burung tembilahan,Inhil . 23 november 2012 , pukul 14:30 )

“ yah... bisa dikatakan adanya ketidaknyambungan antara pak indra dan wakilnya. Pak indra itukan berasal dari kalangan politisi dan pengusaha sedangkan pak yusuf berasal dari birokrat, tentu pola piker dan tata cara bersosialisasi mereka berbeda. “

## **2. Perbedaan Sistem Nilai**

Perbedaan system nilai yang dimaksud dalam hal ini adalah pola-pola pendistribusian tugas-tugas dan fungsi setiap unsur yang ada ditubuh kepemimpinan. Masalah itu kemudian muncul ketika pendistribusian kekuasaan itu tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki atau tidak sesuai dengan potensi yang dimiliki, karena pada dasarnya pemimpin pemerintahan ( Bupati ) tidak bias fair dalam meletakkan orang pada jabatan yang sesuai. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh H.M.Yusuf ( wawancara dilakukan dirumah kediaman beliau, Jl. Sepakat pekanbaru. Tgl 30 November 2012 pukul 16:00 )

“ Melalui pengalaman bertahun-tahun sebagai PNS, menurut saya posisi yang tepat hanya untuk orang yang tepat artinya hanya orang yang telah berpengalaman dan professional yang panta menduduki sebuah jabatan dalam struktur pemerintahan. Yah... janganlah orang partai dibawa dalam bikrokrasi begitu juga sebaliknya janganlah birokrat dilibatkan dengan kegiatan partai. Kalau seperti itu, amburadul pemerintahan.”

Pernyataaan diatas merupakan pandangan H.M.Yusuf yang tidak sejalan dengan Bupati. Baginya keikutsertaan aparat birokrasi dalam partai politik membuat jalannya pemerintahan dapat terintimidasi oleh kelompok tertentu akibatnya banyak aparat pemerintah terlibat dalam politik praktis. Namun, pendapat berbeda diparkan oleh H. Kartika Roni, S.ag selaku ketua fraksi Golkar dan merupakan salah satu orang terdekat Bupati ( wawancara dilakukan dikantor DPD Golkar Inhil, Jl. Telaga Puri . 17 november 2012 pukul 14:00 )



“ Agar pelaksanaan pemerintahan berjalan dengan sesuai harapan, tentu pak Indra membutuhkan orang-orang yang mendukung beliau. Saya rasa, pak Indra selaku Bupati tau betul siapa yang dianggap pantas menduduki sebuah jabatan. “

Berkaca dari hubungan yang kaku dengan wakilnya, tampaknya Indra Muchlis tidak menginginkan kekakuan itu juga terjadi antara beliau dan staf yang ada dalam pemerintahan sehingga beliau menempatkan orang-orang yang dapat mendukungnya.

### **3. Perbedaan Gaya Kepemimpinan antara Bupati dan Wakil Bupati**

Pemimpin dalam pemerintahan daerah ada dua, yaitu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Keutuhan pasangan pemimpin pemerintahan antara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat dilihat dari gaya kepemimpinan yang dipakai oleh masing-masing pemimpin tersebut.

Pandangan Indra Muchlis mengenai gaya kepemimpinannya ( wawancara dilakukan dikediaman bupati, Jl. Telaga Puri tembilahan. 19 november 2012 pukul 16:30 )

“ Gaya kepemimpinan saya merupakan perpaduan pengalaman saya sebagai pengusaha dan politisi. Saya membangun sebuah strategi dimana seluruh daerah dari paling bawah ( masyarakat ) sampai komponen paling atas ( pejabat daerah ) harus terlibat secara aktif dalam pelaksanaan pemerintahan. Jadi... sebisa mungkin saya selalu menghimpun keterlibatan masyarakat. “

Berbeda dengan Indra Muchlis yang bergaya “ solidary maker “ (pengumpul massa ) wakilnya H.M.Yusuf memiliki gaya sendiri dalam kepemimpinannya, seperti dari pernyataan berikut ini

H.M.Yusuf ( wawancara dilakukan dirumah kediaman beliau, Jl. Sepakat pekanbaru. Tgl 30 November 2012 pukul 16:00 )

“ Saya bekerja sesuai dengan kapasitas saya. Saya bukan tipe orang yang banyak bicara dan mengumbar janji. Tapi lihat saja hasil kerja saya. “

### **4. Marketing Politik**

Maksud marketing politik dalam hal ini adalah cara atau upaya yang dilakukan untuk memperoleh banyak dukungan dalam rangka memenangkan Pilkada. Pada kasus Bupati dan Wakil Bupati Inhil berkaitan dengan ambisi politik. Factor marketing politik juga menjadi penyebab berpisahnya pasangan pemimpin pemerintahan ini. Indra Muchlis sebagai Incumbent ingin memenangkan Pilkada Inhil maka untuk mencapai tujuan tersebut ia dan partai politik pendukung harus memilih wakil yang dianggap berpotensi sebagai mesin suara. Berdasarkan perundingan yang panjang antara Indra Muchlis dan partai-partai politik

pendukungnya, mereka memutuskan Rosman Malomo sebagai calon Kepala Daerah untuk maju dalam Pilkada. Hal tersebut sesuai dengan pemaparan Indra Muchlis ( wawancara dilakukan dikediaman bupati, Jl. Telaga Puri tembilahan. 19 november 2012 pukul 16:30 )

“ saya mencalonkan diri saat pemilu 2008 , yah.... Karna apa yang telah ada harus dilanjutkan dan insya allah menjadi lebih baik. Masih banyak rencana pembangunan yang harus diselesaikan dan tidak bisa dalam satu periode kepemimpinan. Kenapa saya memilih berpasangan dengan pak rosmal malomo saat pilkada, itu kan sudah jadi keputusan bersama antara partai dan tim sukses. Lagipula pak rosmal itu kan sahabat saya, maka saya akan sangat senang sekali bekerja bersama sahabat saya.”

Berbeda pula dengan yang disampaikan oleh H.M.Yusuf ( wawancara dilakukan dirumah kediaman beliau, Jl. Sepakat pekanbaru. Tgl 30 November 2012 pukul 16:00 )

” Kenapa saya tidak berpasangan dengan pak indra, karena pak indra sudah memilih pak rosmal. Jadi apa salahnya saya juga mencoba mencalonkan diri sebagai Bupati. “

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, penyebab perpecahan Bupati dan Wakil Bupati Inhil periode 2003-2008 dapat diketahui. Dengan adanya ketidakcocokan pribadi dan perbedaan latar belakang yang melahirkan perbedaan system nilai dan gaya kepemimpinan. Belum lagi marketing politik yang menekankan untuk selektif memilih calon yang akan di usung dapat dijadikan penyebab mengapa pasangan pemimpin pemerintahan ini bersaing dalam Pilkada Kab. Inhil tahun 2008 lalu.

## ***Kesimpulan dan Saran***

### **Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan – pemaparan pada bab sebelumnya dapat diketahui penyebab berpisahannya pasangan pemimpin pemerintahan di Kabupaten Inhil pada akhir jabatan adalah :

#### 1. Ketidakcocokan Pribadi antara Bupati dan Wakil Bupati

Sesuai hasil penelitian di kabupaten Inhil yang mana antara pasangan pemimpin pemerintahan tidak memiliki kecocokan pribadi. Indra Muchlis yang berasal dari kalangan politik dan H.M.Yusuf berasal dari kalangan birokrasi. Secara pribadi mereka tidak berteman, mereka bersanding sebagai Bupati dan Wakil Bupati bukan kehendak mereka, sehingga tidak terjadi komunikasi dan kerjasama yang baik. Mereka bekerja dengan pemikiran masing – masing.

#### 2. Perbedaan Sistem Nilai

Adanya perbedaan system nilai dalam menjalankan kepemimpinan pemerintahan di kabupaten Inhil dapat dilihat dari pemaparan beberapa informan yang disimpulkan bahwasanya Indra Muchlis dalam menjalankan pemerintahan, mendistribusikan kewenangan dalam menempatkan pendukungnya dalam posisi tertentu. Sedang menurut H.M.Yusuf sebuah posisi dalam pemerintahan harusnya di

isi oleh orang – orang yang berkompeten dan professional. Sehingga perbedaan ini menjadi salah satu pemicu perpecahan.

### 3. Perbedaan Gaya Kepemimpinan Antara Bupati dan Wakil Bupati

Antara Indra Muchlis dan H.M.Yusuf dalam memimpin dan menjalankan pemerintahan memiliki perbedaan gaya kepemimpinan. Indra Muchlis menganut gaya kepemimpinan “ solidary maker “ yang lebih terbuka, bijaksana dan memiliki ide serta mampu memecahkan masalah tanpa harus ragu – ragu serta siap menanggung resiko. Sedang H.M.Yusuf menganut gaya kepemimpinan “ administrator “ yang terlalu memikirkan lebih dalam menghadapi masalah yang ada, serta kurang terbuka dalam permasalahan.

### 4. Marketing Politik

Marketing politik menjadi salah satu alasan perpecahan pasangan pemimpin pemerintahan. Indra Muchlis yang ingin menjabat kembali menjadi Bupati melalui pertimbangan dari parpol pendukungnya memilih calon wakil yang berpotensi. Calon pendamping dari parpol dianggap lebih “ menjual “ daripada calon yang berasal dari kalangan independen.

## Saran

Melihat dari hasil penelitian untuk mempertahankan keutuhan pasangan pemimpin pemerintahan ada beberapa hal yang seharusnya diperhatikan oleh calon pasangan pemimpin pemerintahan, antara lain :

1. Apabila seseorang ingin mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah, sebaiknya ia memilih pendamping yang memiliki kecocokan pribadi dengannya. Tidak hanya dalam pelaksanaan tugas pemerintahan tetapi juga di luar kantor mereka akrab secara emosional dan pemikiran. Sehingga tidak ada peluang perpecahan karena disharmonisasi hubungan kedua belah pihak.
2. Pasangan calon pemimpin pemerintahan harus menyamakan pandangan mereka dalam mengambil keputusan sehingga dapat menghasilkan pemerintahan yang berkualitas .
3. Apabila calon kepala daerah memiliki keahlian dibidang pelaksanaan administrasi pemerintahan sebaiknya mengambil wakil yang memiliki keahlian yang sama. Begitu juga sebaliknya, kalangan teknokrat mengambil wakil dari kalangan teknokrat juga sehingga tidak terjadi perbedaan gaya kepemimpinan dalam menjalankan system pemerintahan.
4. Pasangan calon pemimpin pemerintahan sebaiknya memiliki dukungan yang sama, sehingga tidak ada intervensi dari salah satu pihak.

## Daftar Pustaka

- Abu Ahmadi .2002. *psikologi Sosial* . jakarta : Rineka Cipta.
- \_\_\_\_\_ 2003 . *Ilmu Sosial Dasar* . Jakarta : Rhineka Cipta
- Bibit Soeprapto . 1985. *Perkembangan Kabinet dan Pemerintahan di Indonesia* . Jawa Timur : Ghalia Indonesia
- Burhan Bungin.2008.*Penelitian Kualitatif* . Bandung : P.T. Remaja Rosda Karya
- Charles F. Andrain. 1992. *Kehidupan Politik dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya
- Dean G. Pruitt Dan Robin , Jeffrey Z . 2004 . *Teori Konflik Sosial* . Jakarta : Pustaka Pelajar
- Deliar Noer. 1983. *Pengantar Ke Pemikiran Politik*. Jakarta: CV.Rajawali
- Fax Benedanto . 2003. *politik kekuasaan Maciavhelli* , Jakarta : KPG (Kepustakaan Popiler Gramedia )
- Hadari Nawawi , dkk .1998 . *metode Penelitian Kualitatif* . Bandung : Remadja Karya.
- Hugh Mial.2002.*Resolusi Damai Konflik Kontemporer*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Indra Muchlis Adnan. Papadaan: *Pesan dari Kampung Halaman*. Lore Institute.
- \_\_\_\_\_ Serambi : *Belajar dari Tanah Kelahiran*. Lore Institute.
- J. Kaloh. 2007. *Mencari Bentuk Otonomi Daerah Suatu Solusi Untuk Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global*. Rieneka Cipta, Jakarta.
- Maswadi Rauf . 2001 . *Konsensus dan Konflik Sebuah Penjajagan Teoritis* . Dikti Depdiknas
- Maurice Duverger. 2001 . *Sosiologi Politik* . Jakarta : Rajawali Press
- Miriam Budiardjo . 1998. *Dasar – Dasar Ilmu Politik* . Jakarta : PT.Gramedia Utama
- Ramlan Surbakti . 2003. *Memahami Ilmu Politik* . Jakarta : PT. Grasindo
- Syarifuddin Hidayat.2002. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Mandar Maju
- Sukandarrium. 2002. *Metodelogi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta: University Gadjja Mada Press.
- S.P ,Varma . 1995 . *Teori Politik Modern* . Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Sohidin.2004. *Kala Demokrasi Melahirkan Anarkhi*. Jakarta: Lageng Pustaka

Taliziduhu Ndraha . 2003 . *Kybernology* ( Ilmu Pemerintahan Baru ) jilid I , Jakarta : Rineka Cipta

Widodo . 2004 . *Cerdik Menyusun Proposal Penelitian* . Jakarta : Kelopak – Magna Script

Winarto Surakhmad.1989. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*. Bandung: Tarsito

Zamroni . 1992 . *Pengantar Pengembangan Teori Sosial* . Jakarta : PT. Tiara Wacana

### **Peraturan Perundang-undangan :**

*Undang – undang Nomor 22 dan 25 Tahun 1999 Tentang Pemerintaha Daerah*

*Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.*

*Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*

### **Skripsi :**

Muhammad Sarwedi Wibowo. 2012. *Dinamikan Perebutan Kekuasaan Pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkalis Pasca Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2009-2010*. Skripsi tidak di - publikasikan.Pekanbaru: Universitas Riau.

### **Makalah :**

Hadari Nawawi.2007. *Penyelesaian Konflik Melalui Negosiasi; Pendekatan Konfrontatif versus Kooperatif Pada Hubungan Antara Buruh, Manager, dan Pemerintah.*

### **Sumber lain ( internet )**

Indragirihilir.go.id

Infoinhil.com

Inhilku.wordpress.com